

# BAB I

## Pendahuluan

### I.1 Latar Belakang

Burma<sup>1</sup> merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Cina di sebelah utara, di barat dengan India dan Bangladesh, dan di timur dengan Thailand dan Laos. Samudera Hindia merupakan batas alam di sebelah selatan. Burma memiliki beragam etnis yaitu etnis Burma, Shan, Karen, Rakhine, Cina, India, Mon, Arakan, dll.<sup>2</sup> Etnis-etnis tersebut hidup menyebar di pedalaman Arakan, delta Sungai Irrawady, dan di kota-kota yang terdapat di Burma. Hubungan antar etnis di Burma tidak begitu baik, akan tetapi ternyata mereka mampu berjuang bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan nasional. Hal inilah yang membuat sejarah pergerakan nasional di Burma menjadi menarik.

---

<sup>1</sup> Pada tanggal 18 September 1989, Burma berubah nama menjadi *Union of Myanmar* (Myanma Naing-ngan). Perubahan nama ini sebagai usaha untuk mencirikan keberagaman etnis. Nama Burma dianggap hanya mencerminkan satu etnis saja yaitu etnis Burma. Padahal di negara tersebut etnis tidak hanya Burma saja. Perubahan tidak hanya terjadi pada penamaan negara, tetapi juga pada nama tempat dan etnis. Sebagai contoh Kota Rangoon berubah nama menjadi Yangoon, Sungai Irrawady berubah nama menjadi Ayeyarwady, dan nama suku Karen diubah menjadi Kayin. Lihat *A Political Chronology of South-East Asia and Oceania*. 2001. London: Europa Publications.

<sup>2</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi etnis di Burma, lihat Edward Graff dan Harold E. Hammond. 1981. *Southeast Asia: History, Culture, People*. New York: Globe Book Co.

Di samping itu masalah yang cukup kompleks selain keberagaman etnis adalah pertentangan antar golongan yang berbeda ideologi di Burma. Pertentangan antargolongan terjadi antara golongan komunis dengan golongan sosialis.<sup>3</sup> Dilatarbelakangi keinginan untuk mencapai kemerdekaan, golongan yang berbeda ideologi dan pandangan politik tersebut akhirnya bersedia bersatu dan mengesampingkan ambisi masing-masing.

Paul H. Kratoska dalam bukunya yang berjudul *South East Asia Colonial History* mengemukakan bahwa persatuan antar etnis dan perdamaian antargolongan merupakan unsur yang penting dalam pergerakan nasional di Burma. Pertentangan antar etnis akan mempersulit pergerakan nasional.<sup>4</sup> Pertikaian antar golongan akan mengancam kesetiakawanan dan rencana perlawanan. Untuk itu, persatuan antar etnis dan perdamaian antargolongan adalah hal mutlak dalam pergerakan nasional di Burma.<sup>5</sup> Tanpa itu semua, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan akan sia-sia.

Dalam bukunya tersebut, Paul H. Kratoska juga mengemukakan bahwa terdapat empat faktor pendukung dalam pergerakan nasional di Burma (1906-1948)<sup>6</sup>. Keempat faktor tersebut yaitu: *Pertama*, media cetak. Peranan media cetak terlihat

---

<sup>3</sup>Pertentangan antargolongan ini disebabkan perbedaan mengenai cara yang ditempuh untuk mencapai kemerdekaan. Untuk lebih jelasnya lihat Aung San Suu Kyi. 1993. *Bebas dari Ketakutan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm. 27.

<sup>4</sup> Paul H. Kratoska. 1995. *Southeast Asia: Colonial History*. London: Routledge. hlm.57

<sup>5</sup> Paul H. Kratoska. *Ibid.*, hlm.58

<sup>6</sup> Pada periode 1906-1948, pergerakan nasional terbagi dalam tiga tahap. Tahap yang pertama (1906-1917) pergerakan nasional menampilkan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah kolonial Inggris; tahap yang kedua (1917-1937) pergerakan nasional lebih terarah dengan adanya organisasi nasionalis yang berbentuk partai politik; tahap yang ketiga (1937-1948) pergerakan nasional mulai menampakkan kemajuan yang cukup berarti dan munculnya tokoh-tokoh nasionalis yang memimpin organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Lihat Won Z. Yoon. *Ibid.*, hlm.1.

dari diterbitkannya tulisan yang menyebarkan semangat nasionalisme. Media cetak tersebut diantaranya yaitu *Saithan*, *New Mandalay Sun*, *The New Light of Burma*, dan *Dagon Magazine*; *Kedua*, golongan terpelajar. Golongan ini muncul karena dampak dari adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Inggris dan yang mendapat pendidikan dari luar negeri; *Ketiga*, golongan *Pongyis* atau biksu Budha. Mayoritas agama di Burma adalah Budha Teravada. Golongan *Pongyis* merupakan golongan yang dihormati dalam masyarakat Burma. Pada awal pergerakan nasional, golongan ini merupakan pelopor dalam menyebarkan semangat nasionalisme; dan, *Keempat*, organisasi atau partai politik yang mengakomodasi aspirasi-aspirasi kaum nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma.<sup>7</sup>

Diantara keempat faktor tersebut, organisasi atau partai politik mempunyai peran yang cukup penting dalam pergerakan nasional di Burma. Hal ini disebabkan karena organisasi atau partai politik merupakan sarana yang mengakomodasi ketiga faktor lain yang telah disebutkan diatas untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Salah satu organisasi atau partai politik yang mempunyai peran penting dalam pergerakan nasional di Burma adalah AFPFL (*Anti-Fascist People's Freedom League*) yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Burma.

AFPFL merupakan organisasi yang penting dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Burma. Hal ini disebabkan karena AFPFL mampu untuk menyatukan beragam etnis yang ada di Burma untuk mendukung upaya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.57.

memperjuangkan kemerdekaan. Aung San<sup>8</sup> pemimpin AFPFL menekankan pentingnya hubungan baik antara etnis-etnis yang berlainan di Burma karena hal itu merupakan sendi utama persatuan bangsa.<sup>9</sup> Tujuan dari didirikannya AFPFL yaitu untuk melawan pemerintahan fasis Jepang di Burma dan memperjuangkan kemerdekaan Burma.

Pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Burma, Jepang telah memberikan janji kepada Burma untuk memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan pun diberikan oleh Jepang kepada Burma pada tanggal 1 Agustus 1943.<sup>10</sup> Burma dinyatakan merdeka dan berdaulat yang sederajat dalam Lingkungan Bersama Asia Timur Raya (*Greater East Asia Co-Prosperity Sphere*). Dr. Ba Maw<sup>11</sup> diangkat menjadi kepala negara dengan gelar *Nainggandaw Adipati* dan juga sebagai perdana menteri, sedangkan Thakin Mya menjabat sebagai wakil perdana menteri. Dalam struktur pemerintahan, terdapat beberapa posisi kementerian, diantaranya yaitu 1. Menteri Pertahanan yang dijabat oleh Aung San; 2. Menteri Luar Negeri yang dijabat oleh U

---

<sup>8</sup> Aung San merupakan salah satu tokoh nasionalis terkemuka di Burma. Ia dilahirkan di distrik Magwe, Burma pada tahun 1915. Ia memulai karir politiknya sebagai aktivis mahasiswa semasa ia kuliah di *University of Rangoon*. Setelah lulus kuliah, ia bergabung dalam organisasi yang bersifat nasionalis. Pengalaman-pengalamannya dalam berbagai organisasi mengasah kemampuannya dalam hal kepemimpinan. Hal tersebut terbukti dari karir politik dan militernya yang cukup cemerlang pada periode 1940-1947. Michael Leifer. 2001. *Dictionary of The Modern Politic of Southeast Asia* (third edition). New York: Routledge.hlm.64.

<sup>9</sup> Aung San Suu Kyi. *Ibid.*, hlm.26.

<sup>10</sup>John F. Cady. 1958. *A History of Modern Burma*. New York: Cornell University Press.hlm.455.

<sup>11</sup>Dr. Ba Maw dilahirkan di Maubin, Burma pada tahun 1897. Ia mengenyam pendidikan menengah atas di *Roman Catholic School* di Rangoon. Ia melanjutkan pendidikan sarjananya di University of Cambridge, Inggris. Gelar Ph.D di University of Bordeaux, Prancis. Dr. Ba Maw mengawali karir politiknya sebagai pengacara Saya San. Setelah itu, ia aktif dalam kegiatan di pemerintahan dan peradilan. Won Z. Yoon. 1973. *Japan's Scheme for the Liberation of Burma: The Role of the Minami Kikan and The Thirty Comrades*. Ohio: Ohio University Center for International Studies Southeast Asia Program. hlm. 8.

Nu; 3. Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh U Ba Win; 4. Menteri Keuangan yang dijabat oleh Thein Maung; dan 5. Menteri Pertanian yang dijabat oleh Thakin Than Tun.<sup>12</sup>

Meskipun Burma telah diberi status kemerdekaan oleh Jepang, namun pada kenyataannya Jepang masih memegang kendali yang besar dalam pemerintahan Burma. Pegawai pemerintahan Burma kurang menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik karena Jepang terlalu mendominasi pemerintahan. Hal ini terlihat dari dominasi yang dilakukan Jepang terhadap pemerintah Burma. Dominasi tersebut yaitu intervensi Jepang dalam menentukan kebijakan luar negeri Burma dan masalah pertahanan keamanan.<sup>13</sup> Selain itu, Jepang juga mengintervensi pemerintah Burma dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan ekonomi.

Menyadari bahwa kabinet Dr. Ba Maw merupakan *puppet government* bentukan Jepang, kaum nasionalis akhirnya menyusun strategi untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tokoh nasionalis yang terdiri dari Aung San, Let Ya, Kyaw Zaw mengadakan pertemuan dengan tokoh komunis dan sosialis yang terdiri dari Thakin Soe, Thakin Than Tun, Ba Swe, dan Kyaw Nyein. Aung San berusaha meyakinkan golongan komunis dan sosialis untuk bersatu dan berjuang mencapai kemerdekaan. Aung San menyatakan bahwa kemerdekaan Burma akan tercapai jika semua golongan baik komunis maupun sosialis mau berkonsolidasi dan berjuang

---

<sup>12</sup> Hugh Tinker. 1967. *The Union of Burma: A Study of The First Years of Independence*. London: Oxford University Press. hlm.10.

<sup>13</sup> D.R Sardesai. 1981. *Southeast Asia : Past and Present*. Vikas Publishing House PVT.LTD.hlm.284.

bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan.<sup>14</sup> Dengan adanya pernyataan yang persuasif dari Aung San, tokoh-tokoh dari golongan komunis dan sosialis akhirnya bersedia untuk mengadakan pertemuan dan merencanakan strategi untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membentuk *Anti-Fascist Organization* (AFO) pada bulan April 1944.<sup>15</sup> Pada perkembangan selanjutnya, AFO kemudian berubah nama menjadi *Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL). Perubahan nama tersebut disebabkan karena tujuan yang akan dicapai tidak hanya melawan fasisme Jepang, tetapi juga kemerdekaan Burma yang sebenarnya.

AFPFL merupakan organisasi perlawanan anti-fasis yang dibentuk di Pegu, Burma, pada tanggal 19 Agustus 1944.<sup>16</sup> Anggota AFPFL terdiri dari unsur-unsur CPB (*Communist Party of Burma*), PRP (*Peoples Revolutionary Party*), BNA (*Burma National Army*), golongan *pongyis* (biksu Budha).<sup>17</sup> Pemimpin utama dari AFPFL adalah Aung San –yang berasal dari kelompok militer–, sedangkan yang menjabat sebagai Sekretaris Umum adalah Than Tun –yang berasal dari golongan komunis–. Tujuan didirikannya AFPFL tidak hanya sebagai organisasi (yang pada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

<sup>15</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm. 13

<sup>16</sup> Rupert Emerson. 1955. *Representative Government In Southeast Asia*. Cambridge: Harvard University Press. hlm. 44.

<sup>17</sup> Martin Smith. 1999. *Burma: Insurgency and The Politic of Ethnicity*. Bangkok : The University Press Ltd. hlm. 60.

perkembangan selanjutnya menjadi partai politik) untuk melawan pemerintahan Jepang di Burma, tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan Burma.<sup>18</sup>

AFPFL kemudian berkembang menjadi organisasi yang besar dari segi keanggotaan. Tidak hanya golongan komunis dan sosialis saja yang tergabung dalam AFPFL, etnis-etnis minoritas seperti Karen, Chin, Shan, dan Kachin pun bersedia mendukung AFPFL untuk berjuang mencapai kemerdekaan.<sup>19</sup> Aung San menyatakan bahwa agar bisa mencapai kemerdekaan, semua unsur dalam masyarakat harus diikutsertakan. Oleh karena itu, Aung San mengirim wakil-wakil AFPFL untuk melakukan rekonsiliasi pada etnis-etnis minoritas seperti etnis Karen, Shan, Kachin, dan Chin agar mereka mendukung perjuangan AFPFL.<sup>20</sup> Aung San berjanji kepada etnis-etnis minoritas bahwa jika nanti Burma mencapai kemerdekaan dan Aung San terpilih menjadi perdana menteri maka ia akan memberikan otonomi kepada etnis-etnis minoritas dan jaminan kesejahteraan.<sup>21</sup> Hasil dari usaha yang dilakukan Aung San tidak sia-sia, karena beberapa etnis minoritas seperti Kachin, Shan, dan Chin bersedia bergabung. Kesediaan mereka ini dikukuhkan dengan suatu perjanjian bersejarah yaitu Perjanjian Panglong yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1947.<sup>22</sup> Dengan demikian, keanggotaan AFPFL menjadi semakin meluas, selain dukungan dari beberapa etnis-etnis minoritas, tercatat ada *Karen Control*

---

<sup>18</sup> Martin Smith. *Ibid.*, hlm.60.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.61.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.61.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.61.

<sup>22</sup> Isi dari Perjanjian Panglong ada sembilan pernyataan, inti dari Perjanjian Panglong adalah kesediaan etnis-etnis minoritas seperti Shan, Kachin, dan Chin bergabung dalam *Union of Burma* dan dukungan mereka terhadap perjuangan AFPFL. Untuk lebih jelasnya mengenai isi dari Perjanjian Panglong, lihat Paul H. Kratoska. *Ibid.*, hlm. 69. Lihat juga di Lampiran IV hlm.117.

*Organization (KCO), All Burma Youth League* dan Maha Sangha yang bergabung di dalam AFPFL.<sup>23</sup>

Inggris melakukan dekolonisasi<sup>24</sup> di Burma setelah Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jepang. Dalam menyelesaikan dekolonisasi di Burma, Inggris tidak menggunakan cara yang represif tetapi menggunakan cara persuasif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh partai yang berkuasa di Inggris pada masa itu (Partai Buruh) yang lebih humanis. Kebijakan dekolonisasi yang diterapkan oleh Inggris di Burma yaitu menugaskan Gubernur dari Inggris untuk merundingkan kemerdekaan dengan Burma. Rangkaian perundingan dimulai dari masa pemerintahan Gubernur Sir Reginald Dorman-Smith, Sir Henry Knight, Sir Hubert Rance, sampai Perdana Menteri Clement Attlee. Dengan begitu, kemerdekaan Burma dapat tercapai melalui konsensus bukan desensus.

Perdana Menteri Inggris, Clement Attlee mengundang perwakilan AFPFL untuk datang ke London guna membicarakan kemerdekaan Burma. Undangan tersebut diterima oleh Aung San. Delegasi AFPFL yang bertolak ke London terdiri

---

<sup>23</sup> D.R. Sardesai. *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>24</sup> Dekolonisasi adalah pemberian kemerdekaan politik kepada suatu wilayah koloni (jajahan). Dekolonisasi wilayah jajahan ini terutama berkembang setelah Perang Dunia II. Dekolonisasi merujuk pada proses perubahan status pemerintahan dari 'dependent' secara politik atau subordinat menjadi otonom atau berdaulat. Istilah dekolonisasi ini digunakan secara spesifik untuk menggambarkan terpisah dan merdekanya negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa. Pada umumnya, dekolonisasi berarti sebuah negara jajahan menjadi negara yang berdaulat, yaitu yang diakui secara internasional dan memiliki yuridiksi atas wilayah dan penduduknya. Latar belakang semakin banyaknya wilayah jajahan ingin mempunyai pemerintahan sendiri adalah munculnya gerakan-gerakan nasionalis di wilayah yang masih terjajah. Dekolonisasi berlaku pada wilayah yang sebelum Perang Dunia II berada di bawah kekuasaan Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta (ed). 1992. *Encyclopedia of Sociology*. New York: Prentice Hall International. hlm.425-429. Lihat juga di *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. 1997. Jakarta: Delta Pamungkas. hlm.277.



dari Aung San, Thakin Mya, Tin Tut, dan Kyaw Nyein. Mereka tiba di London pada tanggal 9 Januari 1947. Melalui perundingan yang cukup panjang, hasilnya Burma akan mempersiapkan kemerdekaan untuk satu tahun berikutnya. Perundingan tersebut dikenal dengan Perundingan Attlee–Aung San yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 27 Januari 1947.<sup>25</sup>

Pada Perjanjian Attlee-Aung San tersebut, Inggris juga memberi kesempatan bagi Burma untuk mengadakan pemilihan mengenai status Burma setelah merdeka.<sup>26</sup> Pilihan tersebut adalah *pertama*, merdeka sepenuhnya tanpa ada ikatan lagi dengan Inggris, dan *kedua*, *Commonwealth*.<sup>27</sup> Dalam pertemuan tersebut juga disepakati mengenai pembentukan *Constituent Assembly* yaitu majelis konstituante yang bertugas merumuskan bentuk ketatanegaraan Burma. Sekembalinya dari London, diadakan pemilihan *Constituent Assembly* di Burma pada bulan April 1947. Pemilihan tersebut diikuti oleh AFPFL, Partai Komunis Burma (Red Flag Communist), dan *Karen Youth Organization*. Hasil dari pemilihan tersebut, AFPFL memenangkan 170 kursi dari 180 kursi yang tersedia.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm.23.

<sup>26</sup>Untuk lebih jelasnya mengenai isi penting dari Perjanjian Attlee-Aung San, lihat Paul H. Kratoska.*Ibid.*, hlm. 63.

<sup>27</sup>*Commonwealth* atau Persemakmuran adalah sekelompok negara bekas jajahan Inggris yang tersebar di seluruh dunia. Asosiasi *Commonwealth* dibentuk *Imperial Conference* yang diadakan pada tahun 1926, dengan asas ‘kebebasan dan kesamaan dalam status, sehingga tidak ada satu negara pun yang dibenarkan berdiri di atas negara lain, meskipun secara bersama-sama patuh terhadap takhta Inggris sebagai junjungan mereka’. Monarki Inggris adalah simbol dari asosiasi *Commonwealth*. Untuk mengetahui anggota negara yang tergabung dalam *Commonwealth*, lihat *The New Encyclopedia Britannica Vol. 3*. 2003. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc. hlm.494-495. Lihat juga di Ensiklopedia Nasional Indonesia. *Ibid.*,hlm. 68-69.

<sup>28</sup> John F. Cady.*Op.Cit.*,hlm.551.

Namun tak lama setelah pemilihan *Constituent Assembly*, Aung San dibunuh oleh rival politiknya yang bernama U Saw pada tanggal 19 Juli 1947. Walaupun Aung San telah terbunuh, akan tetapi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidak berhenti begitu saja. Sebagai pengganti Aung San, terpilihlah U Nu<sup>29</sup> yang kemudian menjabat sebagai ketua AFPFL. Perjuangan pun terus dilanjutkan sehingga pada tanggal 4 Januari 1948, Burma mencapai kemerdekaan dari Inggris. Dengan demikian, tujuan dari AFPFL pun tercapai yaitu kemerdekaan Burma.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai perjuangan AFPFL di Burma dalam mencapai kemerdekaan. Sejauh penelusuran sumber yang dilakukan oleh penulis, belum ada tulisan –dalam hal ini skripsi– yang membahas mengenai perjuangan AFPFL dalam menyatukan dan menarik dukungan dari golongan-golongan yang berbeda ideologi serta etnis-etnis minoritas di Burma. Pembahasan mengenai perjuangan AFPFL penting karena pada periode tersebut golongan-golongan serta etnis-etnis yang berbeda-beda di Burma berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan Burma. Kondisi tersebut sangat kontras dengan kondisi Burma di masa sekarang ketika pertentangan antar golongan dan antar etnis demikian keras.

---

<sup>29</sup> U Nu merupakan salah satu tokoh nasionalis di Burma pada periode 1930-1961. Ia dilahirkan di Wakema, Burma pada tanggal 25 Mei 1907. Karir politiknya ia mulai saat mengenyam pendidikan di *University of Rangoon*. Pada saat kuliah, ia pernah menjadi ketua *Student Union* – organisasi kemahasiswaan yang kritis terhadap pemerintahan kolonial Inggris– pada pertengahan tahun 1930an. Setelah lulus kuliah, ia bekerja sebagai pengajar dan aktif berorganisasi dalam *Dobama Asiyone*. Hugh Tinker. *Ibid.*, hlm.6-7.

Penelitian terdahulu mengenai perjuangan rakyat Burma untuk mencapai kemerdekaan adalah buku yang ditulis oleh Hugh Tinker yang berjudul *The Union of Burma : A Study of The First Years of Independence* terbitan Oxford University Press. Namun dalam buku tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif mengenai peran AFPFL dalam proses kemerdekaan Burma. Selain buku yang ditulis oleh Hugh Tinker tersebut, terdapat buku yang ditulis oleh George Mc.Turnan Kahin yang berjudul *Kerajaan dan Politik Asia Tenggara* terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Dalam buku tersebut dijabarkan secara kronologis mengenai sejarah Burma. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak dijelaskan secara mendalam mengenai perjuangan AFPFL dalam proses kemerdekaan Burma.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perjuangan AFPFL dalam mencapai kemerdekaan Burma. Untuk membahas masalah di atas, pertanyaan penelitian yang perlu diajukan yaitu, bagaimana latar belakang terbentuknya *Anti-Fascist People Freedom League* (AFPFL)? Lalu bagaimana proses pembentukan AFPFL? Kemudian bagaimana perjuangan yang ditempuh AFPFL untuk mencapai kemerdekaan Burma?

### 1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam historiografi, dikenal adanya beberapa batasan untuk mengkaji suatu permasalahan. Batasan-batasan ini terdiri dari segi temporal (waktu), spasial (tempat), dan tematis.

Dari segi temporal, fokus penelitian ini membahas periode 1944-1948. Tahun 1944 merupakan tahun terbentuknya *Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL) yang dibentuk tokoh-tokoh nasionalis Burma sebagai bentuk perlawanan terhadap Jepang dan sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Burma. Pembahasan juga mencakup mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam organisasi AFPFL dan upaya yang dilakukan AFPFL untuk berjuang mencapai kemerdekaan Burma. Sedangkan tahun 1948 dipilih sebagai akhir kurun waktu penulisan dengan alasan pada tahun tersebut Burma mencapai kemerdekaan.

Pembahasan dimulai dari masa kolonialisme Inggris (1886) untuk memberikan gambaran latar belakang penulisan. Masa kolonial Inggris di Burma mendorong munculnya pergerakan nasional menentang kolonialisme. Pergerakan ini pada mulanya dipelopori oleh beberapa golongan misalnya golongan biksu dan kaum terpelajar. Golongan biksu (*pongyis*) merasa termarginalisasi dengan adanya kolonialisme Inggris dan penyebaran agama Kristen di Burma. Organisasi pun dibentuk sebagai alat perjuangan dalam pergerakan nasional. Pada masa pendudukan Jepang, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan semakin berkembang. Salah satunya yaitu dengan didirikannya AFPFL.

Sementara dari segi spasial, fokus penelitian ditujukan di negara Burma. Pada tahun 1886, Burma merupakan salah satu propinsi, bagian dari India –yang merupakan koloni Inggris pada waktu itu–. Selanjutnya, Burma dijadikan sebuah koloni Inggris yang terpisah dari India pada tahun 1937.

Dalam segi tematis, penulis membatasi penulisan pada perjuangan AFPFL dalam mencapai kemerdekaan Burma. AFPFL merupakan sebuah organisasi pergerakan nasional. Dengan demikian, perjuangan AFPFL terkait dengan pergerakan nasional di Burma. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perjuangan AFPFL meliputi pembahasan mengenai pergerakan nasional di Burma. Hal tersebut untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai perjuangan AFPFL. Pembatasan temporal, spasial, dan tematis ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih mendalam.

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan proses kemerdekaan Burma yang diperjuangkan oleh AFPFL. Tujuan lainnya adalah sebagai bagian dari upaya rekonstruksi sejarah di kawasan Asia Tenggara khususnya sejarah perjuangan kemerdekaan Burma. Hal ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai Burma dan sejarah Burma serta memperkaya historiografi mengenai sejarah pergerakan nasional Asia Tenggara.

## 1.5 Metode Penelitian dan Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode sejarah. Adapun metode sejarah yang dilakukan terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik—baik intern maupun ekstern—, interpretasi, dan historiografi.

Dalam tahap heuristik, digunakan sumber-sumber bacaan yang kebanyakan adalah sumber sekunder yang berupa rekaman sejaman dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis, seperti buku yang pada umumnya ditulis oleh sejarawan non-Burma. Sumber-sumber sekunder yang menjadi referensi dalam penulisan ini adalah buku *Southeast Asia Colonial History* yang ditulis oleh Paul H. Kratoska. Selain buku tersebut, juga ada buku *Southeast Asia from Colonialism to Independence* yang ditulis oleh J.M Pluvier. Buku yang lainnya yaitu *Burma The Course of Independence* yang ditulis oleh Shelby Tucker.

Langkah selanjutnya adalah kritik sumber yang berupa kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku, jurnal, dan monograf. Kritik ekstern dilakukan dengan cara melihat kondisi fisik sumber bacaan yang dipergunakan. Kritik intern dan ekstern digunakan untuk menelusuri kebenaran dari sumber sekunder sehingga didapat fakta yang dapat diuji kebenarannya.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan fakta mengenai AFPFL. Tahap terakhir adalah tahap historiografi. Pada tahap ini penulis melakukan

rekonstruksi terhadap fakta-fakta yang telah diinterpretasi. Penulisan yang dipaparkan yang bersifat deskriptif.

Kendala dalam penelitian ini yaitu penulis tidak mendapatkan sumber primer. Oleh karena itu, penulis harus dapat melakukan *cross-check* terhadap sumber sekunder sehingga sebisa mungkin didapat fakta.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Dalam pencarian dan penelusuran sumber bacaan, penulis banyak mengalami kesulitan baik cakupan isi dan materi yang terkadang tidak sesuai dengan tema penulisan. Namun demikian penulis mendapatkan beberapa sumber yang sesuai dengan tema penulisan. Sumber tersebut berupa buku yaitu *The Union of Burma : A Study of The First Years of Independence* yang ditulis oleh Hugh Tinker. Buku ini diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1967 di kota London, Inggris. Buku ini cakupannya cukup luas mulai dari pemerintahan di Burma pada masa kolonial Inggris, pendudukan Jepang di Burma, cikal bakal pembentukan AFPFL, sampai kemerdekaan Burma. Namun demikian buku ini ada kekurangannya yaitu kurang fokus dalam mengeksposisi organisasi AFPFL.

Sumber yang lain yaitu buku *Southeast Asia from Colonialisme to Independence* yang ditulis oleh J.M. Pluvier. Buku yang terbitan Oxford University Press pada tahun 1974 ini menjelaskan mengenai perjuangan negara-negara di Asia Tenggara (termasuk Burma) dalam memperoleh kemerdekaan dari pihak kolonial

yang menjajah negara masing-masing. Buku ini cukup luas cakupannya karena pembahasan dimulai dari masa kolonial Inggris di Burma sampai kemerdekaan Burma. Namun, dalam buku ini hanya menjelaskan mengenai berdirinya AFPFL, dan selanjutnya tidak dijelaskan mengenai perkembangan AFPFL.

### **1.7 Sumber Data**

Sebagian besar sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan ini banyak diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia yang terletak di kampus Universitas Indonesia, Depok. Data yang diperoleh ada yang berupa buku sekunder atau artikel. Buku sekunder yang diperoleh di Perpustakaan FIB cukup banyak, diantaranya buku *Japan's Scheme for The Liberation of Burma: The Role of the Minami Kikan and the "Thirty Comrades"* yang ditulis oleh Won Z. Yoon; buku *A History of Southeast Asia* yang ditulis oleh D.G.E Hall. Sedangkan di Perpus. Pusat UI, buku yang diperoleh diantaranya *Southeast Asia A Concise History* yang ditulis oleh Mary Somers H. Sumber-sumber lainnya yang berupa buku sekunder dan jurnal juga diperoleh dari Perpustakaan Sekeretariat *Assosiation of Southeast Asian Nation* (ASEAN) yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan yaitu *Southeast Asia Colonial History* yang ditulis oleh Paul H. Kratoska dan buku *The Union of Burma : A Study of The First Years of Independence* yang ditulis oleh Hugh Tinker. Di perpustakaan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang terletak



di Jalan Tanah Abang III No : 23 – 27 penulis memperoleh buku *Representative Government in Southeast Asia* yang ditulis oleh Rupert Emerson. Selain itu, di perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang terletak di Jln. Gatot Subroto Jakarta juga terdapat monograp *Southeast Asia Under Japanese Occupation* yang ditulis oleh Alfred W. McCay sebagai materi bacaan. Untuk mencari sumber-sumber yang lain maka dipergunakanlah teknologi internet. Salah satu situs yang banyak membantu adalah [www.myanmar.gov](http://www.myanmar.gov) dan [www.shanland.org](http://www.shanland.org)

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi yang berjudul “Perjuangan *Anti-Fascist People Freedom League* (AFPFL) dalam Mencapai Kemerdekaan Burma 1944–1948” dibagi dalam lima bab. Susunan bab-bab ini dimulai dari pembahasan mengenai latar belakang munculnya organisasi AFPFL pada masa pendudukan Jepang di Burma. Organisasi ini berdiri sebagai bentuk perlawanan terhadap Jepang dan untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma.

Bab I mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang; tinjauan pustaka; perumusan masalah; ruang lingkup permasalahan; tujuan penelitian; metodologi penulisan; dan sistematika penulisan.

Bab II pembahasannya berisi mengenai pergerakan nasional yang muncul pada masa kolonial Inggris di Burma. Pergerakan nasional di Burma muncul akibat dari ditetapkannya sistem dan kebijakan pemerintah kolonial Inggris di Burma. Pada

periode kolonial Inggris, muncul organisasi yang pada awalnya dipelopori oleh golongan *pongyis*.

Bab III menjelaskan mengenai proses terbentuknya *Anti-Fascist People Freedom League* pada masa pendudukan Jepang. Latar belakang pembentukan AFPFL adalah sebagai bentuk ketidakpuasan kaum nasionalis kepada pemerintah pendudukan Jepang yang mendominasi pemerintahan di Burma.

Bab IV menjelaskan mengenai perjuangan AFPFL dalam upaya untuk memperoleh kemerdekaan Burma. Cara yang ditempuh untuk memperoleh kemerdekaan yaitu melalui jalan diplomasi dengan melakukan perundingan-perundingan dengan Inggris.

Bab V berisi kesimpulan mengenai intisari dari pembahasan mengenai AFPFL